

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Layanan keuangan dengan tajuk “*Buy Now Pay Later*” atau “Beli Sekarang Bayar Nanti” merupakan salah satu bentuk digitalisasi yang ada dalam sektor keuangan. Layanan tersebut biasa dikenal dengan sebutan *paylater* yang serupa dengan layanan kartu kredit konvensional yang dikeluarkan oleh perbankan. *Paylater* dapat didefinisikan sebagai layanan yang memberikan opsi penundaan pembayaran dengan proses pelunasan yang dapat dilakukan secara berkala atau dengan sistem cicilan. Namun, yang membedakan *paylater* dengan layanan kredit konvensional adalah pengguna *paylater* tidak lagi membutuhkan kartu untuk melakukan transaksi, segalanya dilakukan secara *online* melalui gawai peminjam atau disebut debitur. Selain itu, persyaratan untuk dapat menggunakan *paylater* cenderung lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan kartu kredit yang dikeluarkan perbankan, yaitu debitur tidak perlu memberikan data mengenai penghasilan dan pembayaran pajak, tetapi hanya cukup dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Belum ada aturan khusus yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan *paylater*, sehingga dalam pembentukannya penyedia layanan *paylater* bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan ataupun perusahaan penyedia Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang disebut juga sebagai *fintech lending* atau pinjaman *online*. Beberapa contoh layanan *paylater* di Indonesia di antaranya adalah Shopee PayLater, GoPay Later, Akulaku PayLater, Kredivo PayLater, dan Traveloka PayLater. Sebagai contoh, layanan Shopee PayLater yang dikeluarkan oleh *e-commerce* Shopee merupakan hasil kerja sama dengan perusahaan pembiayaan PT Commerce Finance. Namun, selain penyedia layanan *paylater* seperti *e-commerce*, aplikasi *ride-hailing*, dan *online travel agency* (OTA), institusi perbankan juga mengeluarkan layanan *paylater* pada aplikasi *mobile banking*-nya.

Di antaranya, yaitu PayLater BCA yang dikeluarkan PT Bank Central Asia Tbk, Livin' PayLater yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri Tbk, Digibank PayLater layanan dari Bank DBS, dan Allo PayLater milik Allo Bank.

Penelitian ini menjadikan pengguna layanan *paylater* di Jawa Barat sebagai objek yang akan diteliti. Jawa Barat merupakan provinsi yang berada di bagian barat Pulau Jawa. Provinsi Jawa Barat terdiri dari 9 kota dan 18 kabupaten yang di antaranya adalah Kota Sukabumi, Bandung, Cimahi, Banjar, Cirebon, Bekasi, Depok, Bogor, dan Tasikmalaya, serta Kabupaten Sumedang, Bandung, Indramayu, Bandung Barat, Karawang, Bekasi, Kuningan, Bogor, Ciamis, Majalengka, Cianjur, Pangandaran, Cirebon, Purwakarta, Garut, Subang, Tasikmalaya, dan Sukabumi. Provinsi Jawa Barat memiliki penduduk terbanyak di Indonesia pada tahun 2022 dengan jumlah penduduk sebesar 49.405.808 jiwa dengan persentase 70,01% penduduknya merupakan kelompok usia produktif di Jawa Barat, yaitu penduduk di antara usia 15 – 64 tahun yang aktif terlibat dalam kegiatan perekonomian dan menghasilkan barang atau jasa (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2023).

Tidak terdapat data pasti yang dipublikasikan oleh lembaga pengawas sektor keuangan terkait dengan jumlah pengguna *paylater* di Indonesia maupun per provinsi. Namun, PEFINDO Biro Kredit yang merupakan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) atau disebut juga sebagai biro kredit swasta yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan melaporkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan total pengguna layanan *paylater* tertinggi dengan persentase sebesar 25,02% dari 34 provinsi di Indonesia (CNBC Indonesia, 2023a). Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari PEFINDO Biro Kredit bahwa Jawa Barat merupakan provinsi dengan total jumlah utang *paylater* yang masih beredar (*outstanding*) tertinggi di antara provinsi lainnya, yaitu sebesar Rp6,71 triliun atau 26,67% dari keseluruhan total utang *paylater* yang masih beredar sejumlah Rp25,16 triliun (Bisnis.com, 2023a). Tingginya penggunaan layanan *paylater* di Jawa Barat dibandingkan dengan provinsi lain mendorong peneliti untuk menjadikan pengguna *paylater* di Jawa Barat sebagai objek penelitian ini.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Kemajuan dalam bidang teknologi telah mendorong transformasi di berbagai sektor, termasuk sektor layanan keuangan. Digitalisasi menjadi hal yang penting untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan keuangan. Misalnya dalam sektor perbankan, hampir seluruh jenis layanan telah beralih ke dalam bentuk digital, mulai dari pembukaan rekening *online* hingga pengelolaan transaksi perbankan sehari-hari. Selain itu, perdagangan saham telah mengalami revolusi dengan menyediakan *platform* perdagangan daring yang memungkinkan investor untuk memantau dan melakukan transaksi secara *real-time* melalui gawainya. Sistem pembayaran digital juga semakin masif digunakan untuk memfasilitasi transaksi dengan cepat dan efisien tanpa perlu lagi menggunakan uang tunai. Pemberian pinjaman pun mengalami perubahan signifikan dengan munculnya Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau *fintech lending* dan *paylater* yang memanfaatkan teknologi untuk menyederhanakan proses pengajuan pinjaman dan menawarkan solusi pinjaman yang lebih cepat.

Layanan *paylater* dapat menjadi solusi pembiayaan bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan tidak terduga atau ingin mengelola arus kas secara lebih efektif. Didasari oleh proses pengajuan yang mudah dan proses persetujuan yang relatif cepat, banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan layanan ini untuk membiayai aktivitas konsumtif seperti berbelanja di *e-commerce*, membayar tagihan pulsa, internet, dan listrik, serta membeli produk elektronik. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa berdasarkan Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan terdapat 72,88 juta kontrak *paylater* di Indonesia per Mei 2023 (Bisnis.com, 2023b). Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 33,25% yang menunjukkan tren positif pada penggunaan *paylater* di Indonesia. Berdasarkan pernyataan PEFINDO Biro Kredit, nilai utang *paylater* yang masih beredar di Indonesia adalah Rp25,16 triliun dengan Jawa Barat sebagai provinsi yang mendominasi nilai *outstanding* sebesar 26,67% (Bisnis.com, 2023a).

Namun, tingkat adaptasi *paylater* yang tinggi di Indonesia terutama pada provinsi Jawa Barat juga disertai oleh risiko gagal bayar yang tinggi. Serupa dengan nilai tingkat wanprestasi atau gagal bayar yang tinggi pada layanan *fintech lending*,

layanan *paylater* juga memiliki tingkat gagal bayar yang sangat tinggi, PEFINDO Biro Kredit melaporkan kredit tidak lancar (NPL) *paylater* mencapai angka 9,7% atau Rp2,15 triliun (CNBC Indonesia, 2023b). Otoritas Jasa Keuangan menetapkan ambang batas waspada 5% untuk kredit tidak lancar, maka tingkat gagal bayar layanan *paylater* yang ditunjukkan dengan persentase kredit tidak lancar dianggap melebihi batas aman dan patut diwaspadai.

Banyak faktor pendorong yang mendasari terjadinya kredit tidak lancar yang merujuk pada perilaku gagal bayar. Salah satu faktor pendorong perilaku gagal bayar adalah kondisi *over-indebtedness*, yaitu ketika seseorang terlilit utang yang sangat banyak sehingga mengalami kesulitan dalam membayar utangnya. Leandro & Botelho (2022) menyatakan bahwa salah satu faktor penentu dalam *over-indebtedness* adalah tingkat literasi keuangan atau *financial literacy*. Chotewattanakul et al. (2019) menyatakan bahwa orang dengan tingkat *financial literacy* yang buruk memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk berada dalam kondisi *over-indebtedness*. Begitu juga pada penelitian Kurowski (2021) yang menyatakan bahwa *financial literacy* berpengaruh signifikan terhadap kondisi utang seseorang, ditunjukkan dengan karakteristik responden penelitian dengan skala *over-indebtedness* yang rendah memiliki tingkat *financial literacy* yang tinggi.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (2022), tingkat *financial literacy* masyarakat Indonesia terkait dengan layanan *fintech* yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masih tergolong sangat rendah walaupun terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2022, yaitu hanya sebesar 10,90% dibandingkan dengan sektor jasa keuangan lainnya seperti tercantum pada Gambar 1.1. Rendahnya tingkat *financial literacy* ini mungkin melatarbelakangi kondisi *over-indebtedness* yang merujuk pada tingginya perilaku gagal bayar layanan *paylater*. Sedangkan pada tingkat *financial literacy* secara umum yang menguji kemampuan terkait konsep dasar keuangan penduduk berdasarkan provinsi, Jawa Barat memiliki tingkat *financial literacy* sebesar 56,10% (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Angka tersebut merupakan nilai yang paling tinggi ketika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa.



Gambar 1.1 Tingkat Literasi Keuangan Berdasarkan Sektor Jasa Keuangan

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurowski (2021), Hidajat (2021), dan Chotewattanukul et al. (2019) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat *financial literacy*, maka akan semakin rendah risiko keterlilitan utang pada individu. Hal ini sejalan dengan rendahnya tingkat *financial literacy* pada sektor *fintech* dan tingginya tingkat gagal bayar pengguna layanan *Buy Now Pay Later* yang sudah berada di ambang waspada. Selain itu, belum terdapat penelitian terkait pengguna *Buy Now Pay Later* (BNPL) sebagai objek penelitian dengan variabel yang diangkat. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi apakah kurangnya *financial literacy* mungkin menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada tingkat keterlilitan utang yang tinggi pada pengguna layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL). Dalam penelitian ini *financial literacy* individu pengguna layanan BNPL terutama pada literasi utang atau *debt literacy* juga perlu diidentifikasi lebih lanjut untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif terkait *financial literacy* pengguna layanan BNPL yang merupakan bentuk utang jangka pendek.

Selain itu, diperlukan identifikasi kecenderungan dari setiap kelompok dalam determinan demografi seperti usia, jenis kelamin, pendidikan dan pendapatan yang merujuk pada kondisi *over-indebtedness*. Hal tersebut dapat bermanfaat untuk mengkaji ulang kebijakan, risiko finansial, dan pembuatan program penyuluhan terkait keuangan bagi kelompok yang teridentifikasi rentan terjerat *over-indebtedness*. Ditunjukkan Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kurowski (2021) terdapat hubungan antara kelompok usia dengan *over-indebtedness*, yaitu semakin tua seseorang maka semakin rentan individu terjerat *over-indebtedness*. Begitu juga penelitian serupa yang dilakukan oleh Chichaibelu & Waibel (2018),

Majamaa et al. (2019), dan Chotewattanakul et al. (2019) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kelompok usia dengan *over-indebtedness*.

Pada determinan demografi berupa jenis kelamin penelitian yang dilakukan oleh Kurowski (2021), Meyll & Pauls (2019), dan Majamaa et al. (2019) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan kecenderungan individu untuk berada dalam kondisi *over-indebtedness*. Hal ini didukung dengan data dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dihasilkan Otoritas Jasa Keuangan bahwa saat ini terdapat kecenderungan untuk individu dengan jenis kelamin perempuan terjatuh dalam kondisi *over-indebted* terutama dari golongan guru, ibu rumah tangga, dan pelajar (Bisnis.com, 2024). Begitu juga pada aspek pendidikan, penelitian yang dilakukan oleh Kurowski (2021), Majamaa et al. (2019), dan Chichaibelu & Waibel (2018) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pendidikan individu dengan kondisi *over-indebtedness*. Pada aspek pendapatan penelitian yang dilakukan oleh Kurowski (2021), Chichaibelu & Waibel (2018), dan Mutsonziwa & Fanta (2019) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pendapatan individu dengan *over-indebtedness*. Maka dari itu, didukung dengan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Financial Literacy*, *Debt Literacy*, dan Determinan Demografi terhadap *Over-indebtedness* Pengguna Layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) di Jawa Barat**”.

1.3 Perumusan Masalah

Masalah yang muncul berdasarkan data pada latar belakang permasalahan adalah adanya tingkat *financial literacy* yang rendah dengan tingkat keterlilitan utang yang direpresentasikan dengan angka gagal bayar pengguna layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) yang sudah di atas ambang waspada. Maka dari itu, diperlukan penelitian mengenai bagaimana *financial literacy*, *debt literacy* secara khusus, dan determinan demografi memengaruhi keterlilitan utang atau *over-indebtedness* pada peminjam di Jawa Barat. Maka dari itu, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh *financial literacy* terhadap *over-indebtedness* pengguna layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) di Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh *debt literacy* terhadap *over-indebtedness* pengguna layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) di Jawa Barat?
3. Bagaimana pengaruh usia terhadap *over-indebtedness* pengguna layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) di Jawa Barat?
4. Bagaimana pengaruh jenis kelamin terhadap *over-indebtedness* pengguna layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) di Jawa Barat?
5. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap *over-indebtedness* pengguna layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) di Jawa Barat?
6. Bagaimana pengaruh pendapatan terhadap *over-indebtedness* pengguna layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) di Jawa Barat?
7. Bagaimana pengaruh *financial literacy*, *debt literacy*, dan determinan demografi (usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pendapatan) secara simultan terhadap *over-indebtedness* pengguna layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) di Jawa Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diajukan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh *financial literacy* terhadap *over-indebtedness* pengguna layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) di Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh *debt literacy* terhadap *over-indebtedness* pengguna layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) di Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh usia terhadap *over-indebtedness* pengguna layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) di Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui pengaruh jenis kelamin terhadap *over-indebtedness* pengguna layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) di Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap *over-indebtedness* pengguna layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) di Jawa Barat.

6. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap *over-indebtedness* pengguna layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) di Jawa Barat.
7. Untuk mengetahui pengaruh *financial literacy*, *debt literacy*, dan determinan demografi secara simultan terhadap *over-indebtedness* pengguna layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) di Jawa Barat.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari pelaksanaan penelitian ini, terdapat dua manfaat yang bisa diperoleh, yakni dalam aspek teoritis dan praktis. Secara rinci, manfaat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1.5.1 Aspek Teoritis

Studi ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai keuangan, terutama dalam hal pengaruh *financial literacy* dan *debt literacy* terhadap *over-indebtedness* atau keterlilitan utang. Di samping itu, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi atau panduan bagi penelitian berikutnya dalam bidang yang serupa.

1.5.2 Aspek Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis bagi:

1. Pembaca, terutama bagi mereka yang telah atau berencana menggunakan layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya *financial literacy* terutama *debt literacy* yang memadai.
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator untuk menjamin pencegahan asimetri informasi pada *platform Buy Now Pay Later* (BNPL) dengan membuat regulasi dan membuat program edukasi terkait *financial literacy* dan *debt literacy* yang disesuaikan dengan demografi pengguna.
3. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan informasi bagi penyedia layanan untuk menyeimbangkan asimetri informasi pada *platform Buy Now Pay Later* (BNPL).

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan umum, ringkas, dan padat yang menggambarkan secara tepat isi penelitian. Dalam bab ini akan dibahas: Gambaran

Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup teori-teori dari yang umum hingga yang spesifik, dilengkapi dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan diakhiri dengan kerangka pemikiran penelitian. Jika diperlukan, hipotesis juga akan disertakan.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan serta menganalisis temuan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Bab ini mencakup: Jenis Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Populasi dan Sampel (untuk penelitian kuantitatif) / Situasi Sosial (untuk penelitian kualitatif), Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Reliabilitas, serta Teknik Analisis Data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan disajikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disusun dalam sub judul tersendiri. Bab ini terdiri dari dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian, sedangkan bagian kedua memaparkan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian tersebut. Setiap aspek pembahasan dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Dalam pembahasan, sebaiknya dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan menunjukkan jawaban atas pertanyaan penelitian dan hipotesis dan kemudian diikuti dengan saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.

Halaman ini sengaja dikosongkan